

Dimensi Ekonomi Politik Dunia Ketiga dalam Sistem Perdagangan Internasional

Oleh : Syafaruddin Alwi

Pengantar

Tulisan ini dibagi dalam empat bagian. Bagian pertama menjelaskan latar belakang mengapa topik ini yang diangkat sebagai kajian dalam masalah yang dibahas. Bagian kedua, menjelaskan sejarah singkat munculnya Dunia Ketiga dan kaitannya dengan sistem internasional. Ketiga, menjelaskan tentang kekuatan politik Dunia Ketiga dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dominasi negara-negara maju dan bagian terakhir adalah penutup, sebagai kesimpulan.

I

Fenomena Dunia Ketiga sampai saat ini tetap menarik untuk dikaji karena Dunia Ketiga identik dengan profil negara-negara yang sedang berkembang yang masih tetap bergulat dengan perjuangan melawan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu ciri dari keterbelakangan suatu negara yang menurut perspektif model ketergantungan atau model internasional structuralist tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan sistem internasional. Didalam sistem internasional structuralist tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan sistem internasional. Didalam sistem internasional itu terdapat sub sistem perdagangan yang didominasi oleh negara-negara maju yang dikenal dengan rezim perdagangan internasional (international trade regimes)¹.

Makalah ini akan membahas hubungan negara-negara Dunia Ketiga

dengan rezim perdagangan internasional dengan mengajukan beberapa masalah yang muncul dari interaksi hubungan ekonomi politik kedua belah pihak. Pertama, apakah Dunia Ketiga masih memiliki kekuatan politik untuk melakukan negosiasi dalam perdagangan internasional dengan negara maju sehingga mampu menempatkan diri pada posisi yang seimbang dengan negara maju dalam usaha mengurangi ketergantungan ekonomi?. Kedua, upaya apa yang telah dilakukan oleh negara-negara Dunia Ketiga untuk menggalang kekuatan tersebut dan sejauh mana keberhasilannya?.

Argumen yang dapat diberikan mengapa masalah tersebut yang diangkat dapat dikemukakan sebagai berikut; Dunia Ketiga jika ingin maju, menurut tesis

1. Istilah ini digunakan oleh Robert O. Keohane dalam buku Stephen Krasner (Ed), *International Regimes*, Cornell University Press, 1984, p. 150.

ketergantungan², harus mampu mandiri dan memisahkan diri dari sistem internasional melalui revolusi. Tetapi dalam beberapa kasus seperti Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, justru integrasi negara-negara tersebut kedalam sistem perdagangan internasional telah mendorong negara-negara itu berkembang menjadi negara industri baru³. Hasil ini seolah-olah telah mematahkan argumentasi ketergantungan itu sendiri bahwa keterbelakangan hanya bisa diatasi dengan memisahkan diri dari sistem internasional. Namun dibalik itu kebenaran teori ketergantungan juga tidak dapat diabaikan begitu saja karena pada sebagian negara Dunia Ketiga, masih terdapat sebagian besar negara yang tetap saja terbelakang akibat keterikatannya dengan negara-negara maju. Kedua keadaan tersebut menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang inheren dalam pembangunan ekonomi setiap negara sehingga makalah ini mempercayai bahwa kemajuan yang diperoleh bukanlah masalah tergantung atau tidak tergantungnya suatu negara terhadap sistem internasional melainkan ditentukan juga oleh sejauh mana kekuatan politik Dunia ketiga untuk melakukan negosiasi dengan negara maju sehingga terdapat keseimbangan yang saling menguntungkan dalam perdagangan.

Fokus dari tulisan ini adalah pengkajian mengenai posisi negara-negara Dunia Ketiga dalam konteks politik internasional dan pengaruhnya terhadap kemampuan melakukan negosiasi dalam perjanjian-perjanjian perdagangan, terutama dengan negara Industri. Masalah ini dipandang penting untuk dikaji kembali karena faktor kekuatan politik adalah inheren dalam kemajuan ekonomi yang diperoleh suatu negara yang diperoleh suatu negara dalam integrasinya dengan sistem

perdagangan internasional. Sistem perdagangan internasional telah lama diketahui sebagai sistem yang terkait dengan fenomena kapitalisme di Eropa Barat-Laut sejak lebih kurang tiga abad yang lampau dan imperialisme yang menyertainya (Mohtar Mas'ood 1991). Sistem ini menurut perspektif ketergantungan telah melemahkan kekuatan ekonomi-politik negara-negara Dunia Ketiga, sehingga untuk dapat berkembang, berdasarkan perspektif ini, revolusi dalam sistem internasional merupakan salah satu cara. Alternatif ini sukar untuk diterima sehingga reformasi merupakan alternatif yang paling mungkin. Dan itu hanya dapat dilakukan jika negara-negara dunia Ketiga mampu menggalang kekuatan ekonomi-politik antar anggota. Oleh sebab itu tulisan ini merujuk kepada sejarah timbulnya Dunia Ketiga dan perspektif Dominasi dan ketergantungan sebagai basis analisis.

II

Untuk melihat bagaimana hubungan Dunia Ketiga atau negara-negara berkembang (developing countries) dengan negara maju (developed countries), perlu dipahami lebih dulu bagaimana istilah Dunia Ketiga ini muncul. Leslie Wolf-Philips dalam tulisannya "Why The Third World ?" mengungkapkan bahwa secara

3. Hans-Henrick Holm dalam tulisannya *Journal Peace of Research*, 1990, tentang : The End of The Third World, memasukkan Taiwan, Korea Selatan dan Hongkong, Singapore sebagai negara-negara yang digolongkannya menjadi negara industri baru.

2. Lihat Gunder Frank, "The Development of Under Development", dalam Michel Smith, et.al. *Perspectives on World Politics*, bagian 3 : The Politics of Dominance and Dependence.

historis istilah Dunia Ketiga diungkapkan oleh Alfred Sauvy (1952), dimasa puncak perang dingin (cold war) untuk menyebut negara-negara yang sedang berkembang non-komunis diluar dua kekuatan yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), dan blok Timur yang dipimpin oleh ex Uni Sovyet. Ungkapan ini muncul, erat kaitannya dengan proses dekolonisasi pada akhir tahun 1950-an yang melahirkan Dunia Ketiga dalam sistem internasional. Pada mulanya ada dua istilah yang hampir sama tetapi memiliki konotasi yang berbeda yaitu istilah *third force* atau kekuatan ketiga yang juga muncul pada tahun 1950. Istilah Kekuatan Ketiga yang didalam ungkapan Perancis disebut sebagai *Tiers Monde* lebih berkonotasi pengertian politik yaitu cenderung digunakan dalam pengertian Kekuatan Ketiga bagi kelompok negara-negara yang bersifat non-blok (*non-alignment*) dari pada pengertian kelompok negara-negara yang sedang membangun. Pengertian Kekuatan Ketiga cenderung digunakan dalam politik keseimbangan kekuatan antara Blok Barat dan Blok sosialis atau komunis. Dalam kaitan ini William Safire (1972), mengungkapkan bahwa istilah Dunia Ketiga dalam *new political language* tidak tercantum. Namun didalam berbagai diskusi tentang Kekuatan Ketiga menunjukkan pembicaraan yang jelas dalam bahasa Inggris, penggunaan istilah Dunia Ketiga mengikuti ungkapan dalam bahasa Perancis *Tiers Monde* yang lebih diartikan sebagai Kekuatan Ketiga. Ini berarti istilah Dunia Ketiga juga dapat diartikan sebagai *balance of power* antara kubu Timur dan kubu Barat (kekuatan politik).

Terminologi ini kemudian dalam perkembangannya lebih dikenal dalam literatur ilmu Ekonomi Pembangunan

sebagai sebutan bagi negara-negara yang sedang berkembang, yaitu negara-negara yang sedang dalam proses pembangunan ekonomi. Negara-negara yang tergolong dalam kelompok ini umumnya dikenal sebagai negara-negara yang pembangunan ekonominya tergantung kepada bantuan luar negeri negara maju atau negara-negara industri.

Sekarang ini terdapat 128 negara anggota Dunia Ketiga yang berpartisipasi dalam kelompok 77 dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yang 100 negara diantaranya merupakan negara-negara non-blok atau *non-alignment movement* (NAM). NAM merupakan faktor penting sebab melalui organisasi ini posisi kerjasama Dunia Ketiga dipersiapkan dan dinegosiasikan. Semua gerakan sosial dan politik memerlukan organisasi agar dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam hubungan ini Dunia Ketiga telah diterima sebagai gerakan politik yang diakui oleh sebagian besar aktor dalam sistem internasional.

Dunia Ketiga sebagai suatu konsep yang menjelaskan adanya sekelompok negara-negara yang menghadapi situasi ekonomi yang sebanding dianggap oleh Hans Henrick Holm (1990), sangat tergantung pada mekanisme ekonomi yang sama yaitu mekanisme ekonomi internasional yang menurut beberapa perspektif tentang Dunia Ketiga dalam jangka menengah atau dalam jangka panjang tidak mungkin mampu memisahkan diri dari mekanisme itu. Argumen yang dapat diberikan dalam kaitan ini adalah bahwa sistem internasional dirancang berdasarkan ukuran negara, tingkat pembangunannya, dan kepentingan mereka dalam lingkup ekonomi yang vital. Berdasarkan kriteria ini maka sebagian

besar negara Dunia Ketiga adalah terbelakang ekonominya karena Gross National Products (GNP) Dunia Ketiga secara keseluruhan (lebih kurang US \$2700 billion), lebih kecil dari GNP Amerika Serikat (USA), yang mencapai US \$ 3900 billion). Sedangkan China sebagai negara Dunia Ketiga yang terbesar menghasilkan GNP kurang dari 10%-nya GNP USA (Journal of Peace Research, Vol 27, no. 1, 1990).

Situasi keterbelakangan Dunia Ketiga terjadi ketika kapitalisme komersial dan kemudian kapitalisme industri yang disebut oleh Johan Galtung sebagai imperialisme internasional meluas berhubungan dengan perekonomian non-industrial pasaran dunia yang kemudian menempati kedudukan-kedudukan yang berbeda-beda dalam struktur menyeluruh sistem kapitalis internasional. Dalam pengertian ini berarti terdapat perbedaan kondisi antara perekonomian Dunia Ketiga dengan negara-negara maju dalam keseluruhan sistem misalnya perbedaan sistem produksi, distribusi, jenis produksi (Dunia Ketiga mengekspor bahan mentah, sedangkan negara maju barang-barang industri), dan perbedaan posisi. Akibatnya terjadi struktur hubungan dominasi dari negara industri terhadap Dunia Ketiga melalui penguasaan teknologi dan kapital yang menumbuhkan ketimpangan. Konsep keterbelakangan, seperti yang biasanya digunakan mengacu kepada suatu jenis sistem ekonomi dengan suatu sektor primer yang dominan, suatu konsentrasi pendapatan tinggi, sedikit diversifikasi dalam sistem produksi, dan pasar ekstern jauh melebihi pasar intern. Situasi keterbelakangan menghendaki lebih dari sekedar suatu petunjuk adanya ciri-ciri struktural perekonomian terbelakang. Oleh

sebab itu perlu dianalisis bagaimana perekonomian-perekonomian terbelakang yang umumnya dialami oleh sebagian besar Dunia Ketiga, terkait dengan pasar dunia dan ketergantungan pada tingkat sosio-politis historis, bermula dengan meluasnya perekonomian negara-negara kapitalis pada awalnya.

Penetrasi negara-negara maju yang membentuk rezim perdangan internasional, menggunakan doktrin imperialisme yang digambarkan oleh James O'Connor (1970) antara lain bahwa kapitalisme dapat diidentifikasi sebagai neo-imperialisme yang menguasai negara Dunia Ketiga tidak lagi berdasarkan prinsip penguasaan teritorial seperti kolonialisme tradisional, melainkan melalui monopoli kapitalisme. Imperialisme adalah tahap monopoli kapitalis dilukiskan memiliki basis antara lain, melakukan ekspor kapital dan membentuk monopoli kapitalis pada tingkat internasional. Dengan demikian menurut Galtung, imperialisme merupakan salah satu cara bagi suatu bangsa untuk menguasai bangsa lain berdasarkan pola yang dapat berlangsung lama karena banyak faktor yang menstabilkan yang dibangun didalamnya antara lain melalui struktur interaksi feodal.

Monopoli kapitalis pada akhirnya menimbulkan hubungan atau interaksi yang timpang antara negara Dunia Ketiga (Pinggiran) dan negara-negara maju (Pusat) yang menimbulkan dua implikasi (Johan Galtung 1971) :

1. tidak terdapat interaksi Pinggiran dengan bangsa-bangsa pusat lain.
2. tidak terdapat interaksi Pusat maupun pinggiran dengan bangsa-bangsa Pinggiran yang berada pada bangsa-bangsa Pusat lain.

Kadaan ini pada akhirnya

menimbulkan kesenjangan dalam sektor ekonomi domestik negara-negara Dunia Ketiga karena kapitalis internasional hanya berinteraksi dengan negara Pinggiran melalui sektor modern yaitu interaksi yang sifatnya vertikal. Interaksi vertikal yang merupakan salah satu dari mekanisme imperialisme inilah yang dianggap Johan Galtung menyebabkan ketimpangan Dunia dalam berbagai bentuk seperti pertukaran yang timpang diantara negara Dunia Ketiga dan Negara Maju. Sejalan dengan analisis ini Gunder Frank (1966), beranggapan bahwa keterbelakangan yang dialami oleh Amerika Latin sebagai contoh, yang diyakini juga melanda anggota Dunia Ketiga pada umumnya, perlu dipahami dalam kerangka struktur yang berkaitan dengan sejarah pembangunan sistem kapitalis dunia. Keterbelakangan Amerika Latin sekarang ini dalam pandangan Gunder Frank adalah hasil partisipasi selama berabad-abad dari proses pembangunan kapitalis dunia yang selalu berusaha memonopoli perdagangan dunia melalui berbagai cara seperti kerjasama multinational corporation (MNC) dengan negara-negara Dunia Ketiga.

Upaya kapitalis membentuk monopoli melalui cara yang tidak kentara dapat dilihat antara lain pada konsep General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang dikendalikan oleh Amerika Serikat untuk menguasai perdagangan dunia sekaligus melindungi diri dari ekspansi ekspor Dunia Ketiga yang sangat kompetitif dilihat dari harga-harga komoditi. GATT merupakan multilateral trade negotiations antara Amerika Serikat, Jepang, dan masyarakat Eropa untuk mengurangi hambatan terutama tarif yang ditentukan oleh aturan-aturan, norma-norma dan prinsip-prinsip tertentu,

merupakan suatu bentuk yang disebut oleh Robert O. Keohane sebagai rezim perdagangan internasional. Dalam kaitan ini jika kita menggunakan istilah Galtung negara maju dapat menguasai negara berkembang melalui interaksi politis, lewat keputusan-keputusan dalam berbagai bidang kerjasama termasuk kerjasama dibidang ekonomi yang harus dipatuhi oleh negara berkembang. Keputusan-keputusan itu kemudian dapat dibuat sesuai dengan permintaan seperti dalam bentuk teknis bilateral. Penerapan keinginan-keinginan negara maju melalui berbagai perjanjian antara lain Multi-Fibre Arrangement (MFA) dalam perdagangan tekstil antara Amerika Serikat dan Dunia Ketiga, keputusan International Monetary Fund (IMF) tentang syarat-syarat bagi pinjaman keuangan Dunia Ketiga dan sebagainya merupakan contoh-contoh interaksi yang timpang karena Dunia Ketiga berada pada posisi yang lemah, yang cenderung harus "patuh", demi alasan kepentingan pembangunan nasional setiap negara berkembang itu sendiri. Kegagalan perundingan GATT dalam peraturan Uruguay menunjukkan secara politis lemahnya posisi negara-negara Dunia Ketiga dalam proses negosiasi dalam perdagangan internasional. Kesulitan negara berkembang untuk menerobos pasar masyarakat industri dengan produksi yang dalam pembuatannya tersedia keuntungan alami, disebabkan proteksi perdagangan masyarakat industri dalam sektor barang (Dieter Senghaas 1988). Masalah proteksi ini telah banyak dibicarakan dalam berbagai konferensi internasional sejak sepuluh tahun terakhir ini, tetapi belum membawa hasil yang menguntungkan Dunia Ketiga.

Tidak diragukan lagi bahwa pembatasan bea dan pembatasan lainnya menyulitkan jalan masuk kepasar dunia

bagi produksi manufaktur negara-negara berkembang. Jika masyarakat industri bersedia menghapuskan pembatasan bea, maka menurut Dieter Senghaas, mereka harus melakukan penyesuaian struktur yang besar seperti yang sering terjadi. Namun sebenarnya bukanlah satu-satunya alasan bahwa ketidakberhasilan negara berkembang dengan produksinya untuk masuk ke pasar internasional disebabkan faktor biaya, karena produk Dunia Ketiga memiliki keunggulan komparatif. Jadi disini terdapat faktor lain seperti kerjasama diantara anggota Dunia Ketiga itu sendiri agar mampu melindungi kepentingan bersama.

III

Lalu dengan keadaan seperti itu bagaimana posisi kekuatan politik negara-negara Dunia Ketiga dalam kaitan dengan sistem internasional? Hans - Henrik Holm (1990), yang mengutip beberapa penulis antara lain Harris (1986), mengemukakan bahwa Dunia Ketiga dalam proses menghilang. Ini merupakan pengakuan. Sebagai sebutan bagi ide yang radikal yang menempatkan alternatif politik dan ekonomi pada agenda internasional, Dunia Ketiga sudah hilang. Pengakuan bahwa Dunia Ketiga dalam proses menghilang didasarkan pada tiga argumen. Pertama, prevalensi dimensi Timur dan Barat. Kedua, kegagalan program pembaharuan ekonomi dan politik internasional. Ketiga, usaha yang frustrasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang independen. Dan disamping itu Dunia Ketiga bukan lagi merupakan konsep politik yang berguna karena tidak ada lagi agreement yang mendasar didalam Dunia Ketiga tentang isu-isu politik. Didalam Dunia Ketiga

terdapat ketidakseimbangan baik secara ekonomi maupun politik sehingga Dunia Ketiga tidak lagi menjadi kekuatan politik yang dominan didalam sistem internasional. Akibatnya ketika Dunia Ketiga mengusulkan untuk membentuk Tata ekonomi Internasional Baru, tidak berhasil atau gagal. Beberapa pengamat lain yang radikal tentang Dunia Ketiga dalam kaitan dengan sistem internasional juga mulai meragukan eksistensi politik Dunia Ketiga sehingga menganggap secara politis Dunia Ketiga telah "hilang", atau setidaknya tidaknya dalam proses menghilang sebagaimana yang dikemukakan oleh Harris (1986) sebagai berikut : " The Third World is disappearing. Not the countries themselves, nor the inhabitants, such less the poor who so powerfull coloured the original denifition of the concept, but the argument..... the rhetoric remains, now toothless, the decoration for squabbles over the pricing of commodities or flow of capital".

Statemen ini didasarkan pada beberapa kondisi yang terjadi dalam kelompok Dunia Ketiga yaitu, konflik kepentingan yang menyebabkan Dunia Ketiga menjadi terkotak-kotak. Sebagian dari negara-negara Dunia Ketiga telah menjadi negara industri baru seperti Taiwan, Hongkong, Korea selatan, yang berbeda kepentingannya dengan negara Dunia Ketiga lainnya. Kemudian konflik kepentingan diantara negara Dunia Ketiga yang tergabung dalam kelompok pengekspor minyak (OPEC), yang sering tidak menghasilkan kesepakatan dalam menetapkan batas produksi. Selain itu menurut Harris, perbedaan politik memainkan peningkatan peran dalam Dunia Ketiga dimana organisasi politik sudah tidak mampu membereskan konflik-konflik politik internal diantara negara-

negara anggota. Pada pertemuan NAM di Harare (1986) dan di Nicosia (1988), menengahi konflik seperti Sahara Barat, dan Kampuchea sudah menunjukkan kesediaan. Perpecahan itu terlihat pula ketika tidak terdapat kesepakatan dari negara-negara anggota NAM tentang calon ketua dari Selatan sehingga Yugoslavia diangkat sebagai ketua. Dipandang dari perspektif ekonomi, Dunia Ketiga bukanlah konsep yang sangat relevan karena sistem ekonomi internasional menurut Hans-Henrik Holm merembes ke semua negara sehingga semua negara Dunia Ketiga tergantung pada mekanisme ekonomi yang sama. Oleh karena itu ia meragukan kesimpulan Harris. Kekuatan Dunia Ketiga menurut Holm, mungkin hilang pada beberapa bidang saja sehingga Dunia Ketiga masih tetap eksis sebagai aktor internasional. Regionalisasi merupakan fakta yang memperkuat kemampuan Dunia Ketiga secara keseluruhan memobilisasi isu-isu umum sebagaimana dilihat dorongan untuk meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan. Disamping itu perkembangan penting dari institusi internasional seperti Bank Dunia dalam menyusun pengertian yang seragam bagi kebijaksanaan pembaharuan ekonomi Dunia Ketiga, menciptakan latar belakang untuk mendorong solidaritas politik (Pedersen 1988).

Penggalangan kekuatan politik Dunia Ketiga optimis dapat dilakukan kembali karena pada waktu yang sama, struktur internasional telah berubah. Peran dominan superpower dan kekuatan-kekuatan lain sudah berkurang. Hal yang juga dapat dilihat adalah, kemampuan Amerika Serikat sebagai negara "Pusat" untuk menetapkan dan menyusun rezim secara internasional sudah menurun. Sekarang hal ini juga secara

politik diterima oleh administrasi Bush. Kerjasama Timur-Barat akan menggaris bawahi ini dengan mengurangi kepentingan internasional kekuatan militer (Kennedy 1988). Sebagaimana Wallerstein (1989), menganggap bahwa kesempatan diciptakan untuk keaktifan dunia dengan institusi internasional yang lebih kuat. Ini akan memperkuat kekuatan Dunia Ketiga. Upaya pembentukan kerjasama-kerjasama ekonomi regional nampaknya akan menimbulkan dampak politik internasional yang cukup kuat guna menghadapi ketidakseimbangan sistem perdagangan internasional. Terbukti usulan Mahatir Muhammad tentang pembentukan East Asia Economics Group (EAEG), yaitu konsep perdagangan multilateral Asia Timur, telah menimbulkan tanggapan yang luas. Ini berarti kekuatan Dunia Ketiga masih tetap diperhitungkan, sebab jika EAEG terbentuk, struktur perdagangan internasional akan berubah. Dan tidak mustahilakan "mengancam" konsep pasar tunggal Eropa 1992.

Penggalangan ini tidak mudah karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Holm, diantara berbagai faktor, kesukaran mobilisasi dari Dunia Ketiga disebabkan kurangnya pemimpin yang dapat diterima yang mampu berada didepan. Akibatnya negara-negara seperti India, Brasil, dan Zimbabwe, sebagai kekuatan regional hilang. Secara politis kerjasama-kerjasama organisasi regional lebih penting untuk mendukung kepentingan Dunia Ketiga, sebab inkorporasi Dunia Ketiga pada kenyataannya telah diterima sebagai kelompok dalam hampir kebanyakan negosiasi-negosiasi dan organisasi-organisasi internasional. Dalam kenyataan sekarang ini kerja dalam organisasi internasional mengandung negosiasi

diantara negara-negara. Formasi kelompok Dunia Ketiga telah memaksa baik Barat maupun Timur untuk membentuk group-group mereka. Sistem group dalam UNCTAD adalah contoh yang menonjol dari hal ini. Dalam bulan Juni 1989, kelompok 77, bertemu untuk memperingati ulang tahun ke 25 kelompok ini dalam pertemuan itu menghasilkan Deklarasi Caracas yang menekankan kebutuhan untuk mengintensifkan kerjasama Selatan-selatan dan meningkatkan keefektifan organisasi dari kelompok 77.

Kekuatan politik untuk melakukan negosiasi memang penting karena sampai saat ini negosiasi ekonomi internasional diantara sebagian besar kekuatan-kekuatan industri (kelompok 7), tidak memasukkan wakil-wakil dari Dunia Ketiga. Perwakilan di Bank Dunia dan IMF sebagai contoh yang berhubungan dengan kekuatan ekonomi dan organisasi didominasi oleh Barat. Dunia Ketiga harus mencari alternatif forum melalui negosiasi global harus dilakukan terus walaupun sampai saat ini usaha itu masih gagal karena sebagian besar negara-negara Utara merintangi usaha-usaha tersebut. Keberhasilan kerjasama dari negara-negara Nordic dan SADCC dari Southern Africa yang secara efektif mampu menegosiasi sebagian isu-isu global, menunjukkan usaha konkrit sehingga kerjasama mereka menciptakan Tata ekonomi Internasional Baru dalam bentuk ini.

IV

Dari uraian dimuka semakin jelas bahwa posisi Dunia Ketiga dalam proses negosiasi dengan negara industri dalam perdagangan internasional merupakan masalah penting jika dilihat dari kepentingan yang harus diperjuangkan.

Posisi ini hanya bisa direbut melalui berbagai kerjasama regional. Hal yang penting nampaknya bukan lagi terletak pada kontroversi Dunia Ketiga dan Dunia Maju karena mempersoalkan penggolongan ini percuma. Lebih baik bagi Dunia Ketiga secara internal menyelesaikan berbagai konflik kepentingan yang dihadapi sehingga mampu membentuk kerjasama termasuk peningkatan kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN. Konflik-konflik politik yang diakibatkan oleh perbenturan kepentingan seperti masalah kepulauan Sprately yang diklaim oleh beberapa negara ASEAN dan China akan merupakan isu yang bisa memecah kerjasama regional. Secara keseluruhan dapat dinilai bahwa kekuatan politik Dunia Ketiga untuk melakukan negosiasi bagi kepentingan ekonomi belum hilang dan masih mampu untuk dikembangkan lagi walaupun beberapa usaha seperti usulan pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru telah gagal.

Referensi

- Dieterr Senghaas, *Tata Ekonomi Dunia Dan Politik Pembangunan LP3ES*, 1988.
- Dawam Rahardjo (Ed), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang, LP3ES*, 1987.
- Hans-Henrik Holm, *The End of The Third World . Journal Peace of Research*, Vol 27. No. 1 1990.
- Leslie Wolf Phillips, " *Why The Third World ?*, *Third World Quaterly*, Vol 1. No. 1
- Michel Smith, et al (Ed), *Perpectives on World Politics*, bagian 3 : *The Politics of Dominance and Dependence*.
- Stephen D. Krashner (Ed), *International Regimes*, Cornell U.P'1984
- Stephen Haggard, *Pathways From The Periphery : The Politics of Growth in Newly Industrializing Countries*, Cornell U.P. 1990